

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG LEBIH BERKUALITAS (STUDI PADA KANTOR LURAH GERUNG SELATAN)

Aida Hayatun Thaiyah¹

aidahayat09@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Herlina Pusparini²

herlina.pusparini@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Robith Hudaya³

robith.hudaya@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih berkualitas. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan program aplikasi SIMDA Keuangan di pemerintah desa khususnya kelurahan. Model analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas para pegawai Kantor Lurah Gerung Selatan serta studi dokumentasi atas dokumen terkait. Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari Sekretaris Lurah Gerung Selatan, Bendahara Pembantu, dan Kasi Kesra Kantor Lurah Gerung Selatan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIMDA Keuangan hanya memerlukan sekali proses penginputan pada sistem dengan kualitas informasi yang relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan keandalan informasi keuangan. Namun dalam penerapan SIMDA Keuangan di Kantor Lurah Gerung Selatan terdapat beberapa kendala yaitu terjadinya gangguan internet, errornya sistem, dan sukar dalam pembaharuan data.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Penerapan, Pengelolaan Keuangan, SIMDA Keuangan

ABSTRACT

The aims of this study was to determine the application of Regional Financial Management Information System (SIMDA) in better quality village financial management. It is hoped that this research can become new-knowledge and consideration for all stakeholders in terms of regional financial management with the SIMDA Finance application program in village governments, especially sub-districts. Analytical model used is descriptive qualitative analysis with a phenomenological approach. Data were collected through a process of direct interviews with informants using an interview guide, direct observation of the activities of the employees of the Gerung Selatan Headman's Office as well as a study of documentation on related documents. The informants in this study were 3 people consisting of the Secretary of the Gerung Selatan Headman's Office, the Assistant Treasurer, and the Head of Welfare of the Gerung Selatan Headman's Office. The conclusions of this study indicate that SIMDA Finance only requires one input process on a system with quality information that relevant, comparable, understandable, and reliable of financial information. However, in the implementation of SIMDA Finance at the Gerung Selatan Headman's Office, there are several obstacles, namely the occurrence of internet disturbances, system errors, and difficulty in updating data.

Keywords: Local Government, Implementation, Financial Management, SIMDA Finance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan adanya hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran (Maghfurin et al., 2021). Pemerintah selaku pengelola keuangan masyarakat harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan baik secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya kepada masyarakat (Fauziyah dan Handayani, 2017). Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah (Pulungan, 2014). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Ariska dan Indriasari, 2017).

Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor dalam rangka mengoptimisasi manajemen daerah (Yanto dan Akfir, 2019). Program aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Ariska et al., 2019). Program aplikasi SIMDA Keuangan juga dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, yang meliputi proses penganggaran, penatausahaan, hingga proses akuntansi dan pelaporannya (Darea dan Elim, 2015). Maka dengan adanya proses tersebut program aplikasi SIMDA Keuangan mampu mengelola data keuangan daerah secara lebih baik dan lebih berkualitas sesuai dengan dimensi kualitas laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu keandalan informasi, ketepatan waktu, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya kepada masyarakat (Ole, 2014). Dalam penggunaannya, program aplikasi SIMDA Keuangan kerap kali diimplementasikan di berbagai dinas-dinas dan pemerintah desa terkait. Sampai dengan bulan juni 2020, program aplikasi SIMDA Keuangan telah diimplementasikan pada 394 pemda dari 440 pemda pengguna SIMDA (www.bpkp.go.id). Namun dalam pengimplementasian SIMDA terdapat beberapa kendala yang ditemukan, seperti dalam hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang telah mengimplementasikan SIMDA sejak tahun 2014, bahwa terdapat kendala yang berkaitan dengan terganggunya jaringan jika cuaca buruk, pembaharuan data, serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada menjadi penyebab buruknya pengelolaan keuangan (Ariska dan Indriasari, 2017). Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2014), dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi SIMDA di Kabupaten Kutai Kertanegara relatif telah cukup tinggi yang disertai dengan kesiapan sumber daya manusia relatif cukup baik dalam rangka mengimplementasikan SIMDA di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Kantor Lurah Gerung Selatan sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih berkualitas dengan cakupan analisa dari sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Informasi Manajemen

McLeod dan Schell (2008: 12) menyatakan bahwa “sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan informasi bagi para pengguna yang memiliki kepentingan tertentu. Menurut Paoki (2012) “output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan. Peran dari sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dari seorang manajer ketika dihadapkan oleh suatu pemecahan masalah di dalam organisasinya.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Secara garis besar, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengumpulan data, pengolahan data, serta mengevaluasi data, dan menyajikan data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna dan bernilai dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Program aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu pengembangan produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di sektor pemerintahan (Ariska dan Indriasari, 2017). Program aplikasi SIMDA Keuangan merupakan suatu program aplikasi komputer yang terintegrasi dalam membantu proses administrasi pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan (Natsir, 2017).

Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Program aplikasi SIMDA Keuangan memiliki beberapa keunggulan seperti yang dikemukakan oleh Yanto dan Akfir (2019) diantaranya yaitu:

1. Output/laporan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan bersifat fleksibel
2. Berbasis windows
3. Validitas inputan data lebih terjamin
4. Adanya menu otoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 71 ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Adapun pendapatan desa tersebut bersumber dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya (Husna dan Abdullah, 2016). Adapun pelaksana pengelola keuangan desa meliputi Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala

Seksi (Soleman dan Latuconsina, 2019). Terdapat empat klasifikasi yang dikemukakan oleh Ariska et al (2019) yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan orientasi teoritik dengan pendekatan fenomenologi.

Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data, seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan catatan dalam arsip, serta penelitian lapangan atau observasi.

Setting Lokasi

Dalam penelitian ini telah ditetapkan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu pada Kantor Lurah Gerung Selatan sebagai salah satu pemerintah desa yang berada di bawah naungan kecamatan.

Keabsahan Data

Agar data dan hasil wawancara yang dikumpulkan dari tempat penelitian memperoleh keabsahan data, maka dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan yaitu uji credibility (validitas internal).

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data sebelum di lapangan dan analisis data saat di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIMDA Keuangan pada Kantor Lurah Gerung Selatan

Dalam mengelola data terkait informasi keuangan, Kantor Lurah Gerung Selatan sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan karena dapat memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengelola informasi keuangannya. Sekretaris Lurah dan Bendahara Pembantu selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa hanya tinggal menginput data transaksi ke dalam menu-menu aplikasi yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan.

Tabel 1. Analisis Pengelolaan Keuangan dengan SIMDA Keuangan

Tema Yang Ditemukan	Informasi Yang Diperoleh	Sumber Data
Proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA Keuangan	Membentuk <i>database</i> anggaran kinerja Penginputan bukti penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) Penerbitan SPD Mengelola laporan keuangan Mempermudah proses penyajian DPA dalam prosedur penganggaran pada SIMDA Keuangan	Observasi
Kegunaan SIMDA Keuangan dalam proses pengelolaan keuangan pada setiap prosedur	Mempermudah pembuatan SPP, penerbitan SPM dan SP2D, pembuatan SPJ dan penerimaan serta penyetoran pajak pada SIMDA Keuangan Mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah	Wawancara
Kendala Penerapan SIMDA Keuangan	Terjadi gangguan pada internet atau masalah dari <i>server</i> pusat Terjadi <i>error</i> saat pengaksesan aplikasi Sukarnya pembaharuan data	Wawancara

Sumber: Dewi dan Mariska (2018)

Proses Pengelolaan Keuangan dengan SIMDA Keuangan

Data hasil observasi dalam penelitian ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan harus mempersiapkan dokumen keuangan seperti SPJ yang akan dicairkan kemudian melakukan proses penginputan pada SIMDA Keuangan untuk membuat data SPP-SPM. Penelitian Kewas (2019) menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan dengan SIMDA Keuangan dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang dimulai dari penginputan RKA untuk pembuatan DPA, penginputan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, sampai dengan bukti penerimaan dan penyetoran ke bank. Pada penelitian Pangestika dan Sari (2016) menggambarkan bahwa proses pengelolaan keuangan pada SIMDA Keuangan dimulai dari jurnal sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang diolah dengan menggunakan media komputerisasi. Demikian pula untuk belanja dimulai dari penginputan bukti belanja, penginputan penerimaan pajak, penyetoran pajak, pembuatan SPP, SPM sampai dengan SP2D baik itu belanja dengan GU/UP/TU yang kemudian dilakukan *posting*.

Kegunaan SIMDA Keuangan dalam Proses Pengelolaan Keuangan pada Setiap Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Gerung Selatan, Bapak Lalu Randi yang menjelaskan bahwa kegunaan yang diperoleh dengan menggunakan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan yaitu output dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Output yang disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan. Output yang dihasilkan SIMDA Keuangan meliputi proses pengelolaan keuangan yang terintegrasi yaitu proses penganggaran seperti pembuatan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), proses penatausahaan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-SPM (Surat Perintah Membayar), serta proses akuntansi dan pelaporannya dengan adanya pembuatan jurnal hingga pembuatan neraca keuangannya. Dinyatakan juga dalam penelitian Liando et al (2016) SIMDA Keuangan dapat diimplementasikan sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi *user* dari penyusunan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan baik pada SKPKD maupun pada SKPD dengan keuntungan sistem berupa efisiensi dalam melakukan penatausahaan yang hanya membutuhkan satu kali input data transaksi. SIMDA Keuangan dalam melakukan pengelolaan keuangan dapat memfasilitasi setiap fungsi

pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi dan memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran (Yanto dan Akfir, 2019).

Kendala SIMDA Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Lalu Randi, bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu untuk penginputan anggaran atau pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sangat bergantung dengan jaringan internet. Selain itu Ibu Sudiartini selaku bendahara pembantu menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan adalah errornya sistem yang terkadang muncul karena banyaknya instansi yang mengakses aplikasi SIMDA Keuangan secara waktu yang bersamaan. Kendala lainnya juga yaitu pada saat pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan penginputan, maka untuk melakukan pembaharuan data harus melakukan koordinasi dengan verifikator pusat yaitu BPKAD bagian akuntansi yang dimana hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan penelitian Kaleb (2019) bahwa kendala yang sering dihadapi pada penerapan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan yaitu masalah dari server pusat seperti sering terjadinya gangguan internet serta kadangkala terjadinya error sistem pada saat pengaksesan SIMDA Keuangan. Pada SIMDA Keuangan ketika hendak melakukan pembaharuan data, beberapa pegawai mengalami kesulitan yang disebabkan oleh rumitnya proses pembaharuan oleh pusat (Dewi dan Mariska, 2018). Dengan demikian pada saat pengoperasian SIMDA Keuangan untuk proses penginputan data harus dilaksanakan dengan hati-hati dan mempersiapkan bahan-bahan berupa dokumen penginputan terlebih dahulu agar meminimalisir adanya *human error*.

Tabel 2. Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Indikator Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	Informasi Yang Diperoleh	Sumber
Keandalan Informasi	Data yang diinput pada SIMDA Keuangan melalui proses verifikasi dari Kecamatan.	Wawancara dan Observasi
Ketepatan Waktu	Penyusunan laporan keuangan dinyatakan tidak dapat dilakukan tepat waktu tergantung jumlah anggaran yang diinput	Wawancara dan Observasi
Relevan	Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem dalam aplikasi SIMDA Keuangan	Wawancara dan Observasi
Dapat Dibandingkan	Melalui SIMDA Keuangan data keuangan dan laporan keuangan desa dapat diperoleh secara lengkap	Wawancara dan Observasi
Dapat Dipahami	Informasi keuangan yang dihasilkan melalui SIMDA Keuangan dapat dilihat untuk 1 tahun terakhir	Wawancara dan Observasi
	SIMDA Keuangan harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh BPKAD bagian keuangan dan tidak dapat dimodifikasi	Wawancara dan Observasi

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Keandalan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lalu Randi, Sekretaris Lurah Gerung Selatan, selaku informan kunci menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan SIMDA Keuangan dengan indikator andal dapat dilihat dari adanya proses verifikasi oleh verifikator. Data-data keuangan seperti anggaran akan diinput oleh Kelurahan yang kemudian di verifikasi oleh bendahara kecamatan Gerung. Setelah melewati tahapan verifikasi oleh kecamatan, selanjutnya akan disahkan oleh BPKAD bagian keuangan

selaku verifikator terakhir untuk masing-masing OPD. Sejalan dengan yang pernyataan dari Ibu Mariati, selaku Kasi Kesra Kelurahan Gerung Selatan, bahwa Kelurahan hanya menginput data terkait transaksi keuangan seperti data DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dan data lain yang kemudian data-data tersebut akan diproses melalui verifikasi oleh kecamatan, kemudian disahkan oleh BPKAD bagian keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SIMDA Keuangan dapat dikatakan mampu menghasilkan keandalan informasi melalui proses verifikasi dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih berkualitas.

Ketepatan Waktu

Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Randi selaku Sekretaris Lurah yang menyatakan ukuran waktu untuk pembuatan laporan rutin yaitu 1 Bulan sekali, sedangkan untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu pembaharuan setiap 1 minggu sekali, dan untuk pembuatan dokumen anggaran yaitu untuk masa 1 tahun anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Lalu Randi juga menjelaskan bahwa pada tahapan penginputan anggaran sangat memakan waktu karena diharuskan untuk merincikan tiap-tiap indikator yang dianggarkan. Selain itu juga Ibu Sudiartini, Bendahara Pembantu Kantor Lurah Gerung Selatan mengatakan bahwa jika terjadi koneksi buruk pada jaringan internet dapat menjadi salah satu faktor penghambat dari ketepatan waktu untuk menyelesaikan penginputan data. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hertanto (2017) menjelaskan dengan diterapkannya SIMDA Keuangan, maka urutan proses penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih ringkas, hal ini dikarenakan SIMDA Keuangan bersifat otomatis sehingga data hanya membutuhkan satu kali penginputan kemudian data tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Relevan

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lalu Randi, bahwa dalam mengelola keuangan Kantor Lurah Gerung Selatan menggunakan SIMDA Keuangan hanya membutuhkan sekali input yang kemudian oleh sistem akan diproses secara otomatis sesuai dengan kategorinya masing-masing. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa didalam penggunaan aplikasi SIMDA, semua informasi keuangan dapat diperoleh seperti laporan keuangan perbulan, SPP, dan dokumen keuangan lainnya. Tidak hanya itu, penjelasan terkait relevansi dari SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa juga diterangkan oleh ibu Mariati, bahwa untuk memperoleh informasi keuangan Kantor Lurah Gerung Selatan secara lengkap dan terperinci hanya boleh melalui BPKAD bagian keuangan selaku verifikator teratas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Natsir (2017) bahwa dengan SIMDA Keuangan setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing yang sudah terprogram langsung oleh sistem, yang dimana pengguna hanya memerlukan penginputan data ke dalam sistem. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dengan SIMDA keuangan jika dilihat dari indikator Relevan dapat digolongkan sangat baik.

Dapat Dibandingkan

Untuk kemampuan SIMDA Keuangan memberikan laporan keuangan dalam satu tahun terakhir, informan menyatakan setuju seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Lalu Randi bahwa SIMDA Keuangan dapat memperlihatkan laporan keuangan dan data keuangan lain di tahun sebelumnya. Demikian pula disampaikan oleh Ibu Mariati, bahwa laporan keuangan atau dokumen lain seperti SPP, SPM dapat dilihat di tahun sebelumnya namun harus melalui BPKAD bagian anggaran dan bagian keuangan. Penelitian Pangestika dan Sari (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA Keuangan dapat dibandingkan antar periode ditahun sebelumnya dan antar

instansi untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Indikator dapat dibandingkan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan data keuangan lain yang dihasilkan SIMDA Keuangan dapat dilihat dan dibandingkan untuk satu tahun sebelumnya.

Dapat Dipahami

Indikator dapat dipahami dalam penelitian ini yaitu SIMDA Keuangan memberikan tambahan laporan keuangan dan data keuangan lain yang dapat dimodifikasi agar lebih mudah dipahami. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Lalu Randi yang menyatakan pada SIMDA Keuangan setiap menu sudah secara otomatis dimodifikasi oleh operator yaitu BPKAD, sehingga setiap OPD tidak dapat memodifikasi pembuatan laporan keuangannya dan dokumen keuangan lainnya. Demikian pula disampaikan oleh Ibu Mariati dan Ibu Sudiartini bahwa dalam mengelola keuangan desa menggunakan SIMDA Keuangan harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh operator yaitu BPKAD bagian keuangan.

Tabel 3. Analisis Data Faktor Pendukung Penerapan SIMDA Keuangan

Indikator	Informasi Yang Diperoleh	Sumber
Komunikasi	Adanya sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan secara bertahap	Wawancara
Sumber Daya Manusia	Dilakukan pelatihan khusus atau BIMTEK (Bimbingan Teknis) tentang SIMDA yang diadakan oleh BPKP	Wawancara
Sikap/Disposisi	Adanya pernyataan setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan	Wawancara
Struktur Birokrasi	Terdapat pengawasan terstruktur terhadap SIMDA Keuangan	Wawancara

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Komunikasi

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi pada Kantor Lurah Gerung Selatan mengenai penerapan SIMDA Keuangan dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lalu Randi, Sekretaris Lurah yang menjelaskan bahwa komunikasi dan sosialisasi mengenai penerapan SIMDA Keuangan dilaksanakan secara bertahap dan terkadang secara tidak langsung. Komunikasi dan sosialisasi dapat berupa diskusi dengan Lurah dan pegawai yang bertugas pada bagian keuangan. Dengan adanya hasil analisis diatas, dapat ditemukan bahwa untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada Kantor Lurah Gerung Selatan didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.

Sumber Daya Manusia

Faktor pendukung lainnya yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Mariati, seorang Kasi Kesra yang menjelaskan bahwa masing-masing OPD sudah harus di BIMTEK (Bimbingan Teknik) terlebih dahulu untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan. Pelatihan tersebut diadakan oleh BPKAD yang bekerja sama dengan BPKP sebagai narasumber. Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Lurah Gerung Selatan cukup memadai, yang dimana hal tersebut didukung oleh adanya kegiatan pelatihan khusus bagi para OPD untuk mampu mengoperasikan SIMDA Keuangan tersebut.

Sikap/Disposisi

Dalam hal sikap/disposisi ditemukan adanya respon yang baik dari para implementor. Para pegawai di Kantor Lurah Gerung Selatan menyatakan setuju dengan adanya penerapan SIMDA Keuangan dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih berkualitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Lalu Randi selaku Sekretaris

Lurah Gerung Selatan yang menjelaskan bahwa SIMDA Keuangan dapat memudahkan dalam mengelola pencairan anggaran dengan cara sekali penginputan pada menu aplikasinya yang kemudian saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah laporan keuangan.

Struktur Birokrasi

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap sub unit dan proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada Kantor Lurah Gerung Selatan sudah cukup baik. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan Ibu Sudiartini selaku Bendahara Pembantu Kantor Lurah Gerung Selatan, yang menjelaskan bahwa penginputan data dilakukan di kelurahan oleh Sekretaris Lurah selaku user yang berwenang dalam mengoperasikan SIMDA Keuangan, kemudian data yang sudah diinput tersebut diverifikasi oleh bendahara kecamatan dan disahkan oleh BPKAD bagian keuangan selaku admin kunci untuk aplikasi SIMDA Keuangan. Dengan demikian, untuk masing-masing OPD hanya bisa membuka data keuangannya sendiri dengan password dan user yang telah dibuat di awal proses. Namun apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data oleh kelurahan, maka untuk merubahnya harus melalui koordinasi dengan BPKAD bagian keuangan selaku verifikator SIMDA Keuangan.

KESIMPULAN

SIMDA Keuangan memudahkan proses pengelolaan keuangan desa di Kantor Lurah Gerung Selatan. Pegawai hanya melakukan sekali proses penginputan data pada sistem. Dengan penerapan SIMDA Keuangan pada Kantor Lurah Gerung Selatan dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangannya yaitu mulai dari proses penganggaran hingga proses akuntansi dan pelaporannya yang menghasilkan sebuah laporan keuangan. Selain itu kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA Keuangan di Kantor Lurah Gerung Selatan meliputi keandalan informasi, relevansi, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Tentunya dalam penerapan SIMDA Keuangan tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Kantor Lurah Gerung Selatan seperti adanya sosialisasi dan pelatihan khusus terkait penerapan SIMDA, serta adanya pernyataan setuju yang dibarengi dengan pengawasan terstruktur terhadap SIMDA Keuangan. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang dialami seperti terjadinya gangguan pada internet, kemudian kadangkala terjadinya error pada sistem, serta sukarnya pada saat proses pembaharuan data.

REFERENSI

- Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan (JRKTL)*, 2(September 2015), 15–23.
- Ariska, Y. I., & Indriasari, N. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu). *Managament Insight*, 12(2), 51–63. <https://doi.org/10.33369/insight.12.2.51-63>
- BPKP. (2021). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Bpkp.Go.Id. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 114–122.
- Dewi, N. C., & Mariska, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan*

- Perbankan*, 3(1).
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, 15–24.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282–293.
- Kaleb, B. J. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 781–790.
- Kewas, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2019). Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 108. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25598>
- Liando, G. Y., Elim, I., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. 4(1), 1473–1484.
- Maghfurin, L. R., Isnaeni, D., & Zamzami, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(19), 2773–2783.
- McLeod, R. J., & Schell, G. . (2008). *management information system* (10th ed.). Salemba Empat.
- Natsir, I. (2017a). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi*.
- Natsir, I. (2017b). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi*.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Accountability*, 3(2), 1–15.
- Pangestika, A. ., & Sari, Y. P. (2016). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Managemn Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. *Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT)*, 1–4.
- Paoki, R. (2012). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal Ilmiah Unklab*, 16, 78–85.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Pulungan, M. (2014). Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas. *Jurnal Bina Praja*, 06(04), 269–281. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.269-281>
- Soleman, K., & Latuconsina, Y. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Desa Dan Pemanfaatan Ti Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Buru Yang Dimoderasi Dengan Peran Pendamping Profesional. *Jurnal Maneksi*, 8(2), 254–260. <http://www.ejournalpolnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/viewFile/395/252>
- Yanto, E., & Akfir. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). *Indonesian Journal Of Strategic Management*, 3(1), 44–59.